



DUTA

“Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial harus terus didorong bersama dengan komitmen politik dari negara melalui Kepala Negara.”

Anis Hidayah

Anggota Komnas HAM

Politik & Hukum | Hlm 4

Perlu Komitmen Politik Tangani Pelanggaran HAM Berat

Pemulihan korban pelanggaran HAM bukan hanya mengenai ganti kerugian.

TRI SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) butuh dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Kita butuh dukungan Presiden agar kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial harus terus didorong bersama dengan komitmen politik dari negara melalui Kepala Negara,” kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Saat ini ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya telah diselesaikan Komnas HAM. Kendati demikian, jalan untuk

mengadili belasan kasus itu terganjal karena belum disidik Jaksa Agung. Para komisioner Komnas HAM telah bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Desember 2022.

Menurut Anis, pihaknya berharap pertemuan itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding/ MoU*). MoU itu terkait koordinasi dan komunikasi bersama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat sesuai kewenangan tiap-tiap lembaga.

Komnas HAM, lanjutnya, telah mengagendakan pertemuan lanjutan dengan Jaksa Agung. Salah satu yang akan dibahas, kata Anis, rencana kasasi perkara HAM berat dalam Peristiwa Paniai dengan terdakwa

tunggal Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang dibebaskan majelis hakim Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.

“Juga terkait berkas-berkas kasus pelanggaran HAM berat lain yang Komnas HAM sudah lakukan penyelidikannya, sudah selesai periode kemarin, tapi belum ditindaklanjuti,” jelas Anis.

Satu hal lagi yang akan dibahas, sambung Anis, ialah rencana Komnas HAM dalam membentuk tim *ad hoc* kasus dugaan pelanggaran HAM berat terkait pembunuhan aktivis Munir. Pada Desember 2022, Komnas HAM sudah menyepakati anggota tim *ad hoc* dari internal ialah Atnike Nova Sigi, Hari Kurniawan, dan Uli Parulian Sihombing.

Jalan

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee

Anandar mengkritisi rencana pembangunan jalan di lokasi tempat tinggal korban pelanggaran HAM berat. Rencana itu merupakan tindak lanjut dari penyelesaian nonyudisial yang akan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menurut Rivanlee, pembangunan infrastruktur seperti jalan atau saluran irigasi bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan. Itu disebabkan pembangunan itu seyogianya merupakan tugas negara kepada warga negaranya.

“Itu terlalu menyimplikasi konsep pemulihan. Pemulihan korban pelanggaran HAM bukan hanya mengenai ganti kerugian,” katanya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Rivanlee menegaskan pemulihan korban pelanggaran HAM harus mencakup aspek keadilan ataupun prosedur dan jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses terhadap pemulihan atas penderitaan yang mereka alami.

Pembangunan infrastruktur seperti itu tidak membedakan ada tidaknya Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).

Sebelumnya, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono ditugaskan Presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim PPHAM. Ia diminta membangun secara signifikan daerah-daerah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat seperti di Aceh. (P-5)